

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pandangan yang telah lama berkembang bahwa pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh iuran dari seluruh warga negara dari bangsa yang sedang membangun itu dalam bentuk prakarsa dan karsa mereka. Warga negara, pria maupun wanita tanpa kecuali dituntut untuk dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya bagi kepentingan pembangunan negara dan bangsanya. Dalam hal ini warga negara pria maupun wanita bahu membahu bekerjasama untuk kepentingan nusa dan bangsanya dalam kedudukan yang sama secara hukum. Dalam lingkup duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.

Pandangan tersebut di atas dilaksanakan dan dihayati oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pandangan yang akan banyak menunjang usaha pembangunan bangsa menuju pada kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Hal ini telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 30 ayat 1 bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembe-
laan negara."

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan di dalam Trilogi Pembangunan dalam unsur pertamanya yaitu peme-

rataan; di dalam hal ini yaitu;

- Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita; antara lain:
- Peningkatan pendidikan dan keterampilan wanita terutama di daerah pedesaan, antara lain, melalui pendidikan informal dan pendidikan keterampilan lainnya, termasuk pendidikan kewiraswastaan;
 - membentuk kader-kader wanita bagi pembangunan desa;
 - memperbanyak kegiatan produktif, terutama bagi wanita yang ekonominya lemah (Buku II, Bahan Penataran, GBHN, h. 43).

Menunjuk pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami, mengapa pemerintah negara Republik Indonesia telah berusaha, berkepentingan dan mengikutsertakan wanita di dalam derap langkah pembangunannya.

Menyadari akan pentingnya wanita menjadi warga negara yang produktif sesuai dengan status dan peranannya dalam masyarakat untuk pembangunan suatu negara, maka telah banyak negara berkembang selalu mengikutsertakan wanita sebagai tenaga pembangunan. Keikutsertaan wanita dalam pembangunan suatu negara itu dilaksanakan dalam berbagai bentuk usaha pendidikan di antaranya melalui pendidikan luar sekolah menyangkut berbagai bidang atau program pembangunan di antaranya masalah gizi, keluarga berencana, pendidikan anak prasekolah dan bidang keterampilan wanita. Semua program itu biasanya dilaksanakan dengan harapan agar wanita dapat menjalankan status dan peranannya sebagai isteri, ibu dan anggota masyarakat. Dengan terlaksananya status dan peranan wanita dalam kehidupan keluarga akan menunjang tercapainya keluarga

sejahtera yang dapat menjadi modal dan dasar tercapainya negara sejahtera.

Pandangan ini telah lama dikembangkan di Indonesia melalui berbagai cara dan bentuk di antaranya melalui pendidikan masyarakat, "melulu untuk masyarakat wanita, yaitu Kursus PBH Wanita, KKOD Wanita, KKM Wanita. Di sini mata-mata pelajaran kewanitaan diberikan terdjalin dengan mata2 peladjaran lainnja. Usaha lain untuk memupuk tenaga kader wanita adalah dengan mengadakan Kursus Ibu (Santoso, 1957, hal. 74).

Selanjutnya di dalam perkembangan mengikutsertakan dan keikutsertaan wanita di dalam pembangunan ini telah berkembang di dalam wadah program pembangunan yang disebut Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Peningkatan Peranan Wanita untuk mencapai Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Program PKK berada di bawah pengayoman Menteri Dalam Negeri dan Program P2WKSS di bawah pengayoman Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (sekarang Menteri Negara Urusan Peranan Wanita).

Khusus untuk kepentingan latar belakang penelitian ini maka penulis akan lebih banyak mengarahkan perhatian pada Program PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Hal ini telah ditunjang oleh kenyataan hadirnya PKK sebagai suatu program pembangunan di mana pemeran utamanya adalah wanita melalui: 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 30 th.1981,

2) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 1981, tentang Pembentukan Team Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Team Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di dalam Surat Keputusan itu dapat disimak beberapa hal yang khusus menyangkut pembinaan keluarga sejahtera yaitu:

Pengertian PKK (Bab I Keputusan Menteri Dalam Negeri pasal 1,b)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah merupakan suatu gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai peran utamanya.

Tujuan PKK (Bab II Keputusan Menteri Dalam Negeri Bagian I, Pasal 2)

Tujuan PKK adalah mewujudkan keluarga sejahtera yang menikmati ketenangan, ketenteraman dan kesejahteraan hidup lahir maupun bathin dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sasaran PKK (Bab II Keputusan Menteri Dalam Negeri Bagian II Pasal 3).

Sasaran PKK adalah keluarga, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan, yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kepribadiannya ke arah kemampuan dalam bidang:

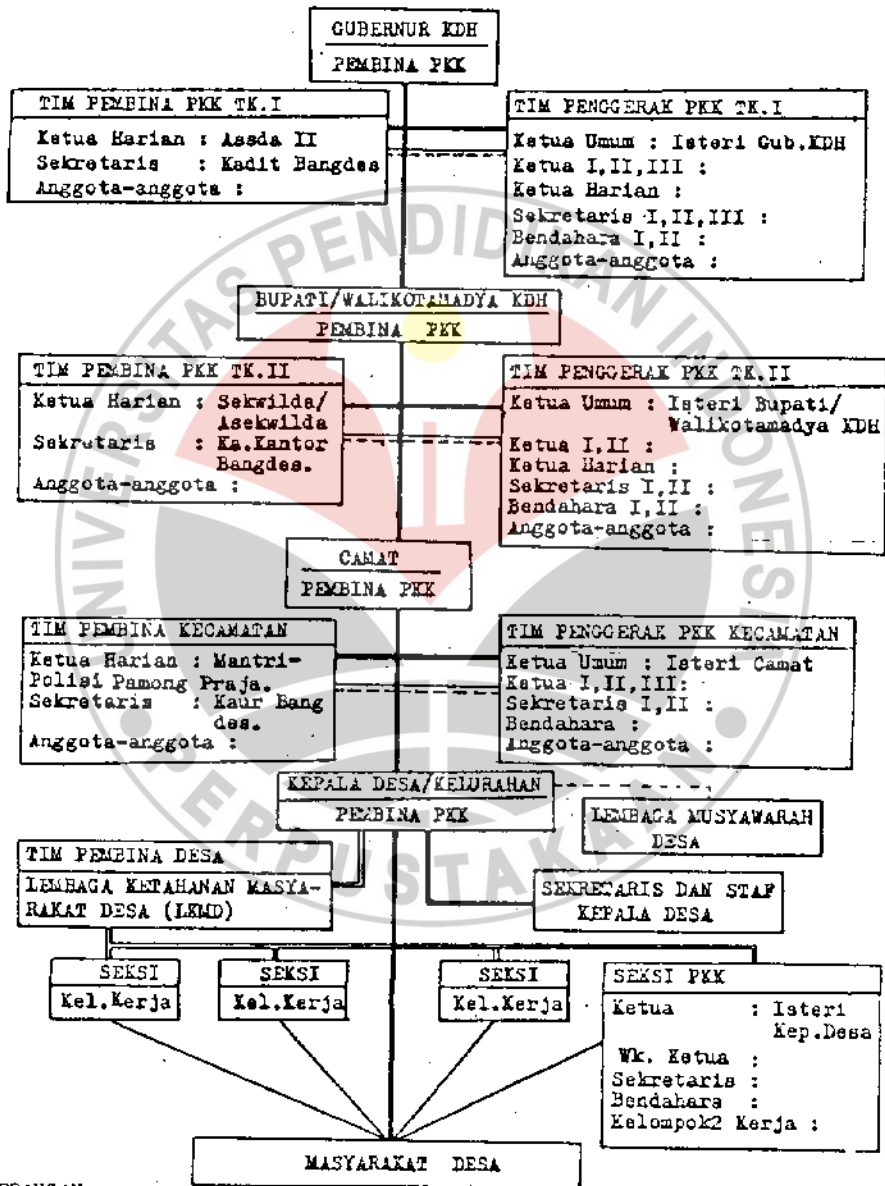
- a. Mental spiritual yang meliputi: sikap dan perilaku hidup anggota keluarga sebagai insan hamba Tuhan, warga negara dan warga masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Fisik material yang meliputi: Sandang, pangan dan papan yang sepadan, sehat dan serasi, kesehatan pribadi, lingkungan hidup yang lestari serta peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Kedudukan Team Penggerak PKK (Bab III Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bagian Pertama, Pasal 6).

Team Penggerak PKK adalah unsur pelaksana PKK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri untuk tingkat pusat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Camat untuk Kecamatan selaku Pembina PKK dengan memperhatikan bimbingan teknis dari Team Pembina LKMD dari masing-masing tingkatan Pemerintahan.

Setelah mengetahui pengertian, tujuan, sasaran dan kedudukan Team Penggerak PKK ini, maka dapat dilihat pula tentang: Struktur mekanisme Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah Jawa Barat, seperti terlihat pada Bagan 1 di bawah ini:

Bagan 1
STRUKTUR MEKANISME GERAK
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)
DI DAERAH JAWA BARAT



KETERANGAN :
 ————— : Garis Komando
 ===== : Garis Bantuan
 - - - - - : Garis konsultasi dan koordinasi
 : Garis konsultasi

Sumber : Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang
 PKK dan LKMD Pembinaan Kesejahteraan-

Dari mekanisme di atas dapat terlihat fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD memiliki berbagai seksi di antaranya Seksi P4, Seksi Ekonomi, Seksi Sosial, Seksi Keamanan dan Ketertiban, Seksi Agama, Seksi PKK, Seksi Penerangan, Seksi Keamanan, Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian dan Seksi PPLH. Di dalam rangka pengembangan LKMD, Seksi PKK dengan program PKK-nya dipandang sebagai program utama dalam LKMD sebagai suatu gerakan yang langsung menyentuh setiap keluarga dalam rangka mencapai tujuan pembangunan menciptakan keluarga sejahtera.

Di dalam rangka pengembangan program PKK ini penulis menghayati bahwa kaum wanita merupakan subyek yang langsung berpartisipasi dalam usaha melaksanakan Program PKK tersebut.

Di dalam hal ini pula para pemimpin wanita desa diharapkan sebagai agen perubahan sosial dengan usaha mereka turut serta di dalam mengembangkan Program PKK.

Di dalam mereka memimpin pelaksanaan Program PKK di lingkungan mereka masing-masing, maka mereka telah mendapatkan suatu penilaian dari para Pembina PKK dan para Penggerak PKK pada tingkat Kecamatan, Kabupaten atau Kodya. Sehingga untuk ini adanya ketetapan tentang desa-desa yang berhasil dalam kegiatan LKMD dengan Program PKK-nya. Sebagai ketetapan puncak pada tingkat propinsi telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821/Ks.200-Kes/SK/81 tentang Evaluasi Prestasi Pelaksanaan Program PKK/P2WKSS

di Jawa Barat tahun 1980/1981.

Dengan adanya prestasi dalam pelaksanaan Program PKK dengan 10 Program pokoknya yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila -
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Mengembangkan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan sehat

(Disingkat dari Himpunan Peraturan-peraturan PKK dan LKMD Propinsi Jawa Barat, 1980, hal. 64 s/d 66). Merupakan suatu indikator telah berjalannya suatu proses kepemimpinan yang sampai batas-batas tertentu dapat dinyatakan adanya efektivitas kerja dari pada pemimpin wanita yang turut serta mengelola dan mengkomunikasikan tujuan dan harapan terlaksananya Program PKK itu.

Efektivitas kepemimpinan seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: rasa tanggung jawab, persepsi terhadap tujuan organisasi, keadaan sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, sikap terhadap program organisasi, motif berprestasi, keahlian khusus dan lain sebagainya.

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan maka permasalahan akan dibatasi pada faktor status sosial ekonomi (SES) pemimpin wanita desa serta sikap mereka terhadap Program PKK sebagai salah satu program pembangunan merupakan faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas kepemimpinan mereka di dalam Program PKK.

Efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin merupakan suatu perbuatan adanya keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan sesuatu usaha di dalam suatu organisasi. Efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin dapat terlaksana apabila adanya kelebihan pada orang yang memimpin itu, di samping faktor lain seperti: lingkungan eksternal, pengikut atau anggota kelompok dan struktur organisasi.

Namun demikian adanya kelebihan pada diri pemimpin itu sendiri merupakan faktor yang kuat dan tidak dapat diabaikan dalam rangka mencapai efektivitas dalam melaksanakan proses kepemimpinan seorang pemimpin.

Dalam hal ini Dr. Haji Ruslan Abdulgani dalam ceramahnya pada Seminar Efisiensi Kerja yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara pada bulan Oktober 1958 di Cipayung mengemukakan: "Bahwa kepemimpinan atau leadership pada umumnya memerlukan sifat kelebihan daripada yang memimpin terhadap yang dipimpin. Sifat kelebihan tersebut meliputi tiga hal yaitu:

- a. Kelebihan penggunaan fikiran
- b. Kelebihan dalam rohaniah
- c. Kelebihan dalam badaniah

Dari kenyataan dan landasan berpikir tersebut di atas maka muncul kehendak untuk mengadakan penelitian yang bertumpu pada masalah yang penulis rumuskan dalam judul penelitian sebagai berikut:

"SIKAP DAN STATUS SOSIAL EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN PEMIMPIN WANITA DALAM PROGRAM PKK."

Penelitian mengenai Kepemimpinan telah banyak dilakukan di antaranya tentang: Pengaruh keinginan akan suatu tipe Kepemimpinan Terhadap Job satisfaction (Kepuasan Kerja) (Prodjo Soemarto, 1975, hal. 11). Di dalam penelitian ini kurang dipersoalkan apakah tipe kepemimpinan itu efektif atau tidak efektif bagi keseluruhan organisasi yang dipimpinnya.

Penelitian lain mengenai kepemimpinan telah banyak dilakukan dalam hubungannya dengan ciri-ciri pemimpin sebagaimana dikehendaki oleh pengikutnya telah dilakukan oleh Jenkins pada tahun 1947, kesimpulan penelitian itu dikemukakan bahwa: "The Leader is the 'best of us', but he apparently must not be too much the 'best of us'" (Krech, et al, 1962, hal. 439).

Selanjutnya Hollingworth (1942) menemukan suatu kenyataan pemimpin yang dikehendaki di antara anak-anak adalah "The leader is likely to be more intelligent, but not too much more intelligent, than the average of the group led" (Krech, et al, 1962, hal. 439).

Penelitian yang dilakukan oleh Sanford (1952) yaitu mengenai peranan pengikut terhadap fenomena pemimpin. Dari penelitian ini Sanford menarik kesimpulan bahwa "Faktor kepribadian pengikut mempunyai peranan yang cukup berarti terhadap responsnya pada seorang pemimpin" (Krech, et al, 1962, hal. 443).

Berdasarkan kenyataan beberapa penelitian tersebut di atas, maka untuk sementara ini penulis menganggap bahwa penelitian dengan perumusan judul tersebut di atas merupakan suatu masalah yang pertama kali diteliti.

B. Masalah Yang Diteliti

Untuk menentukan masalah yang akan diteliti, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Hal yang perlu dipertimbangkan itu, sebagaimana dikemukakan oleh B.W. Tuckman di dalam bukunya Conducting Educational Research, bahwa suatu penelitian harus berdasarkan identifikasi pertama pada keterbatasan si peneliti dan kedua, keterbatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Untuk alasan atau pertimbangan pertama apakah si peneliti mampu memecahkan permasa-

lahan penelitian itu berdasarkan ruang lingkup waktu yang tidak terlalu lama, dengan biaya yang cukup murah. Alasan atau pertimbangan kedua apakah dengan mengumpulkan data penelitian akan mempunyai nilai kegunaannya setelah diinterpretasikan dengan proses logis sehingga dapat menjawab apa yang terjadi dan mengapa terjadi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang mempunyai nilai akurat bagi kepentingan pelaksanaan pendidikan (Tuckman, 1972, hal. vi).

Berdasarkan kedua pertimbangan ini, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang: Suatu masalah sejauh manakah hubungan fungsional antara Efektivitas Kepemimpinan Pemimpin Wanita Dalam Program PKK Dengan Faktor Status Sosial Ekonomi dan Sikap Mereka Terhadap Program PKK Sebagai Salah Satu Program Pembangunan." Variabel yang akan diteliti oleh penulis adalah:

a. Efektivitas Kepemimpinan

Di dalam melaksanakan tugas dengan baik sebagai pemimpin, maka kerja seorang pemimpin perlu dilaksanakan secara efektif. Hal ini merupakan tuntutan yang wajar untuk dapat tercapainya tujuan suatu organisasi atau kelompok.

Efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menyangkut masalah fungsi pemimpin, gaya kepemimpinan dan kenyataan pribadinya sendiri. Membahas tentang fungsi kepemimpinan dapatlah dikemu-

kakan pendapat sebagai berikut:

The primary functions include those essential to the exercise of leaderships, executive, planner, policy maker expert, external group representative, controller of internal relations, purveyor of rewards and punishment, arbitrator and mediator (Krech et al, 1962, hal. 43).

Dalam hal ini dapatlah digambarkan bahwa seorang pemimpin yang bekerja secara efektif, sewajarnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin yaitu: sebagai pelaksana, perencana, pembuat keputusan, ahli, dapat mewakili kelompoknya, pengawas dalam hubungan intern, pemberi ganjaran dan hukuman, seorang yang dapat berlaku adil dan seorang perantara antara orang yang berselisih untuk mencapai perdamaian.

Di samping itu kepemimpinan yang efektif akan dapat terlaksana apabila pemimpin itu sendiri menjadi pemimpin yang efektif. Hersey dan Blanchard menjelaskan pengertian mengenai pemimpin yang efektif, yaitu: "An effective leader is able to adapt his style of leader behavior to the needs of situation and the followers" (Hersey & Blanchard, 1972, hal. 80).

Di sini konsep seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya terhadap kebutuhan kelompok (pengikut) dari situasi yang dihadapi.

Suatu analisis lain yang dapat dihubungkan dengan peranan seorang pemimpin yang efektif perlu didukung oleh seorang atau pribadi yang produktif. Hal ini digambarkan oleh

Gilmore tentang ciri-ciri seorang pemimpin dengan kepribadian yang produktif yaitu adanya:

1. Self-esteem
 2. Clear sense of problems of life
 3. Social responsibility
 4. Grapple of problems of life
 5. Independent
 6. Strength and courage to reach decision
- (Gilmore, 1974, hal. 226-229)

Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang menyangkut atau sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri yaitu kenyataan sikap terhadap situasi dalam hal ini program pembangunan dan kenyataan dirinya dalam persepsinya terhadap kenyataan status sosial ekonomi. Hal ini berarti bahwa variabel efektivitas kepemimpinan (EK) merupakan variabel dependen yang dapat dipengaruhi dan atau mempunyai hubungan fungsional dengan variabel lain; dalam hal ini variabel sikap (SKP) dan variabel status sosial ekonomi (SSE).

b. Sikap

Masalah sikap seseorang merupakan masalah yang paling rumit untuk diselidiki karena merupakan sepe-rangkat unsur yang ada pada diri manusia. Sedemikian ru-pa rumitnya masalah sikap ini, sehingga banyak yang me-ngatakan, bahwa sikap tidak dapat diteliti secara lang-sung.

Untuk menjawab pendapat ini, maka pada empat puluh tahun terakhir ini para ahli psikologi dan psikologi sosial terus berusaha memberikan berbagai definisi tentang "attitude" (sikap). Sambil bertopang pada suatu pendapat bahwa "mempelajari masalah sikap merupakan hal yang rumit tetapi sesuatu yang menarik dalam kehidupan manusia sepanjang masa."

Untuk keperluan penelitian ini perlu dikemukakan dua definisi tentang sikap.

Menurut Allport (1935):

Attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience exerting a directive or dynamic influence upon the individual responses to all objects or situations with which it is related.

Menurut Lambert and Lambert (1964):

An attitude is an organized and consistent manner of thinking, feeling and reacting with regard to people, groups, social issues, or more generally, any event in one's environment. Its essential components are thoughts and beliefs, feelings (or emotions) and tendencies to react (Glen, 1975, hal. 25).

Dari definisi ini dapat diketahui komponen-komponen sikap. Semua ini dapat dijadikan landasan untuk dapat memahami sikap pemimpin wanita terhadap Program PKK sebagai Program Pembangunan.

Sikap para pemimpin wanita terhadap Program PKK dapat ditarik dari apa yang ia pikirkan dan ia ketahui (kognisi), perasaannya dalam lingkup suka dan tidak suka (feeling) dan kecenderungan bertindak dan bereaksi (tendencies to react atau kecenderungan psikomotor) dalam lingkup dan ber-

hadapan dengan Program PKK sebagai program pembangunan.

Apabila kesiapan mental yang terorganisasikan dalam lingkup kognisi, perasaan dan kecenderungan bertindak terhadap Program PKK, oleh para pemimpin wanita begitu tinggi, maka dapat diramalkan pemimpin wanita memiliki kecenderungan mempunyai sikap positif terhadap Program PKK, yang berarti akan menunjang efektivitas kepemimpinannya.

Dalam penelitian ini, sikap terhadap Program PKK sebagai variabel bebas (independen) yang dapat mempengaruhi variabel efektivitas kepemimpinan sebagai variabel tak bebas (independen).

c. Status Sosial Ekonomi

Setiap masyarakat mengenai stratifikasi dan mobilitas sosial. Hal ini yang memungkinkan terjadinya perbedaan kelompok dengan struktur yang berbeda. Setiap anggota masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat tertentu. Pengelompokan dalam struktur masyarakat umumnya didasarkan pada tingkat umur, jenis pekerjaan, agama, keturunan dan sebagainya. Masing-masing kelompok memiliki kategori yang berbeda-beda. Sebagaimana kategori dalam pekerjaan: pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta. Pengelompokan atau pengkategorian yang lebih khas dalam pekerjaan umpamanya pegawai kantor, guru, pedagang, ABRI, buruh tani, buruh pabrik, petani dan lain-lain.

Pembagian pengelompokan dalam masyarakat dapat pula didasarkan pada status sosial ekonomi. Masyarakat dipandang sebagai kelas-kelas yang berjenjang. Ada kelompok yang berstatus sosial ekonomi tinggi, menengah dan rendah. Masing-masing yang memiliki jenjang status tertentu membentuk kelompok sendiri-sendiri sekalipun masih dimungkinkan adanya mobilitas sosial antar jenjang status itu secara horizontal maupun vertikal. Lingkungan status sosial ekonomi tertentu menentukan pula tingkah laku para anggotanya. Hal ini dapat terlihat pada kecenderungan anggota kelompok yang termasuk kelompok status sosial ekonomi tertentu untuk menerima atau menolak tugas tertentu dalam kegiatan berorganisasi. Dengan perkataan lain pemimpin wanita dengan status sosial ekonomi tertentu mempunyai kecenderungan bertingkah laku tertentu sebagai seseorang yang turut terlibat sebagai pengelola suatu organisasi dalam hal Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Ada beberapa ciri khas yang digunakan oleh para ahli untuk menentukan status seseorang dengan menggunakan ciri pekerjaan, tingkat pendidikan dan jumlah pendapatan untuk menentukan tingkat status sosial ekonomi seseorang dengan metoda obyektif, metoda subyektif dan metoda reputasi (Krech, 1972, hal. 313). Karakteristik status sosial ekonomi yang dikemukakan Warner dkk. menggunakan ciri pekerjaan, pendapatan, jenis perumahan dan daerah tempat tinggal untuk menentukan tingkat status sosial ekonomi seseorang (Miller, 1964, hal. 100). Dalam penelitian ini, ciri yang digunakan oleh

penulis dalam penentuan tingkat status sosial ekonomi adalah latar belakang pendidikan formal, mata pencaharian, penghasilan, kepemilikan dan daerah tempat tinggal.

Berdasarkan analisis tingkat status sosial ekonomi dan mobilitas sosial di atas, maka tingkat status sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang di dalam kelompoknya atau berhadapan dengan kelompok lain di luar kelompoknya. Oleh karena itu variabel ini merupakan variabel bebas (independen) yang dapat mempengaruhi variabel lain.

C. Tujuan Penelitian

Program PKK adalah suatu program pembangunan yang langsung menyentuh setiap keluarga dalam rangka mencapai tujuan pembangunan menciptakan keluarga sejahtera dalam lingkup masyarakat adil dan makmur. Di dalam kegiatan PKK kaum wanita merupakan subyek yang langsung secara aktif memegang kendali dan menggerakkan pelaksanaan Program PKK. Di dalam pelaksanaan program PKK ada wanita yang bertindak sebagai pemimpin, dalam jenjang sebagai pembina PKK ataupun penggerak PKK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program PKK dalam tingkat jenjang struktur organisasi pemerintahan yang lebih rendah. Di dalam penelitian dimasalahkan tentang efektivitas pemimpin wanita di dalam pelaksanaan Program PKK pada jenjang pemerintahan dan wilayah pemba-

ngunan yang paling bawah yaitu pada tingkat desa (kelurahan), terutama pada Kelurahan yang telah diakui sebagai kelurahan yang memiliki prestasi di dalam pelaksanaan Program PKK.

Dalam pelaksanaan Program PKK pada kelurahan yang dianggap memiliki prestasi tertentu perlu diteliti seberapa jauh hubungan antara efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita dalam Program PKK dengan sikap dan status sosial ekonomi mereka. Sebab sikap dan status sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya di dalam berfungsi dan berperan sebagai seorang pemimpin.

Melalui penelitian ini perlu diungkapkan profil efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita serta variabel-variabel lain yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Dalam penelitian ini penulis membatasi kajiannya pada tiga variabel yaitu efektivitas kepemimpinan, sikap dan status sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah: untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita khususnya pemimpin wanita dalam Program PKK pada tingkat desa/kelurahan. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hal-hal berikut:

1. Adakah hubungan fungsional antara variabel efektivitas kepemimpinan dengan variabel sikap terhadap Program PKK sebagai program pembangunan?
2. Apabila hubungan fungsional itu ada, adakah hubungan itu merupakan hubungan yang bermakna?
3. Adakah hubungan fungsional antara variabel efektivitas kepemimpinan dengan variabel status sosial ekonomi?
4. Apabila hubungan fungsional itu ada, adakah hubungan itu merupakan suatu hubungan yang bermakna?
5. Sejauh manakah keterpaduan hubungan antara variabel sikap terhadap program PKK sebagai program pembangunan dengan tingkat status sosial ekonomi para pengurus PKK?
6. Sejauh manakah keterpaduan hubungan antara variabel efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita sebagai Pengurus PKK dengan tingkat status sosial ekonomi pemimpin wanita serta sikap terhadap Program PKK sebagai program pembangunan?

D. Pentingnya Masalah Ini Diteliti

Masalah efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita sebagai pengurus PKK menurut hemat penulis perlu diteliti karena masalah tersebut berkaitan erat dengan proses pengembangan program PKK sebagai sesuatu yang telah terstruktur merupakan struktur yang pendekatannya berdasarkan "top down approach." Di samping itu PKK dengan segala programnya dan

di dalam proses pelaksanaannya program kerjanya sangat berkaitan erat dengan pendidikan luar sekolah melalui pendekatan Kelompok-kelompok Kerja (Pokja) yang sasarannya keluarga dan khususnya kaum wanita. Efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita dalam Program PKK merupakan salah satu dimensi untuk mengukur tercapainya tujuan program tersebut. Hal ini dapat dijadikan bahan peramalan atau studi perbandingan terhadap produktivitas program melalui efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita dalam Program PKK. Dengan perkataan lain efektivitas kepemimpinan dapat dijadikan sasaran bahan kajian untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program, dalam hal ini Program PKK.

Efektivitas kepemimpinan sebagai suatu dimensi perilaku seorang pemimpin merupakan suatu sumber dan pendorong untuk terlaksana kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam tujuan dan sasaran PKK serta Sepuluh Program Pokok PKK.

Suatu program pembinaan kesejahteraan keluarga seyogianya mempertimbangkan perilaku terlaksananya kepemimpinan yang efektif dari pemimpin wanita yang seharusnya mengembangkan program itu. Implikasi dari pernyataan ini, bahwa program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditujukan kepada kelompok kerja wanita tani, kader gizi, KKB, Kerja Paket A dan Pokja Keterampilan seyogianya dikembangkan dari bawah (grass root atau bottom-up approach). Bagi para pembina PKK dan para penggerak PKK membahas masalah efektivitas

vititas kepemimpinan pemimpin wanita merupakan sesuatu yang mutlak perlu. Karena tanpa memahami masalah efektivitas kepemimpinan itu, maka program PKK yang telah dirancang dan dicanangkan akan merupakan usaha yang sia-sia ditinjau dari sudut tenaga, biaya dan kesempatan (waktu).

Pentingnya penelitian terhadap efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita ini dapat dikemukakan atas dasar dua alasan pokok.

Pertama, tinjauan dari segi teoritik. Peninjauan dari segi teoritik, penelitian ini bermaksud menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita sebagai pengurus Program PKK.

Faktor tersebut meliputi unsur kepribadian dan faktor yang menyangkut kehidupan sosial ekonomis para pemimpin wanita. Seberapa jauh kedua hal itu mempengaruhi efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita. Dengan diketemukannya hubungan antara faktor atau variabel tersebut, maka akan membuka kesempatan untuk merancang dan melaksanakan penelitian tentang efektivitas kepemimpinan dalam area dan lingkup yang lebih luas.

Kedua, tinjauan dari segi praktis. Peninjauan dari segi praktis penelitian ini akan memberikan bahan masukan kepada para team pembina dan team penggerak PKK. Hasil penelitian ini akan memberikan masukan sebagai bahan sumbangan dalam melanjutkan dan mengembangkan Program PKK. Sebab

pemimpin wanita di dalam melaksanakan Program PKK merupakan komponen penentu, di mana efektivitas kerja sebagai pemimpin banyak dipengaruhi oleh dimensi kepribadiannya yaitu sikap terhadap PKK sebagai program pembangunan dan aspek sosiologis khususnya tingkat status sosial ekonominya. Hasil penelitian ini secara praktis akan membantu team pembina dan team penggerak PKK untuk mundur selangkah meninjau kembali tentang pelaksanaan Program PKK dan penempatan pengelola PKK yang diharapkan sebagai pembaharu dan agen perubahan sosial untuk mencapai kehidupan pada taraf yang lebih maju untuk mencapai keluarga sejahtera dalam masyarakat adil dan makmur. Dengan langkah ini diharapkan kita akan memiliki an-cang-ancang untuk dapat menyusun pelaksanaan program yang lebih maju dan penempatan tenaga yang lebih tepat, logis dan tuntas.

Dengan demikian penelitian ini akan menyumbangkan nilai praktis untuk pembangunan masyarakat melalui Program PKK.

E. Pembatasan Penelitian dan Istilah

1. Pembatasan Penelitian

Adapun yang diteliti adalah para pemimpin wanita sebagai pengurus pada Seksi PKK pada tingkat desa/kelurahan. Oleh karena itu, sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah pemimpin wanita sebagai pengurus Seksi PKK di tingkat desa/kelurahan. Data tentang efektivitas kepemimpinan,

sikap terhadap Program PKK sebagai program pembangunan dan tingkat status sosial ekonomi diperoleh dari pemimpin wanita yang menjadi pengurus PKK pada tingkat desa/kelurahan.

Sebagai daerah penelitian adalah Kotamadya Bandung, dan kelurahan yang dijadikan daerah penelitian terdiri dari:

Kelurahan Dago Kecamatan Coblong

Kelurahan Merdeka Kecamatan Bandung Wetan

Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong

Pengambilan Kelurahan Dago sebagai daerah penelitian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 321/Ks.200-Kes/SK/81 Hasil Evaluasi Prestasi Pelaksanaan Program PKK/P2WKSS di Jawa Barat tahun 1980/1981. Kelurahan Dago merupakan Kelurahan Pengembangan terbaik II dalam Prestasi PKK dengan nilai 63,45.

Penunjukan Kelurahan Merdeka dan Kelurahan Cijagra berdasarkan petunjuk dari Kepala Kantor Bangdes Kodya Bandung. Kelurahan Merdeka dan Cijagra merupakan kelurahan di Kotamadya Bandung sebagai kelurahan yang LKMD dengan PKK-nya yang dapat diandalkan. Dengan perkataan lain dua kelurahan tersebut merupakan kelurahan pengembangan yang memiliki Prestasi dalam pelaksanaan Program PKK. Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Bangdes Kotamadya Bandung dalam wawancara oleh penulis pada tanggal 1 Oktober 1981.

Prosedur pengambilan sampel mempergunakan teknik sampling total dalam lingkup "purposive sampling." Dalam pengertian sampel yang purposif ialah pemimpin wanita pengurus

PKK dan semua pengurus PKK dari tiga kelurahan semuanya dijadikan sampel penelitian sebanyak 105 orang.

2. Batasan Istilah

Agar terdapat pengertian yang sama terhadap beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka perlu diajukan pengertian tentang istilah yang secara operasional dipergunakan dalam judul penelitian ini.

2.1 Efektivitas Kepemimpinan

Efektivitas Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menampilkan gaya tingkah laku kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan para pengikutnya (anggotanya). Hal ini telah banyak dibahas oleh beberapa ahli di antaranya Davis and Filley (1971, hal. 71), Davis and Filley (1971, hal. 63), Krech, et al (1962, hal. 431), Hersey and Blanchard (1972, hal. 80). Berdasarkan perumusan atau gambaran yang dikemukakan oleh para penulis ini, maka efektivitas kepemimpinan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu proses kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam bentuk kehendak dan perbuatan dalam hal:

- membuat rencana pengembangan pelaksanaan Program PKK di lingkungannya.
- menggerakkan anggota kelompok belajar PKK.
- memberikan inspirasi dan cita tentang PKK.

lam kelompoknya. Status sosial ekonomi ini dapat atau turut menentukan peranan atau fungsi orang tersebut dalam kelompoknya.

Warner, et al. banyak menekankan masalah status sosial ekonomi pada cara yang berhubungan dengan pekerjaan, pendapatan, jenis rumah dan daerah tempat tinggal (Miller, 1964, hal. 100).

Untuk keperluan penelitian ini, maka tingkat status sosial ekonomi menunjuk pada indikator seperti mata pencaharian, sumber pendapatan, tipe rumah, pemilikan perabot rumah tangga, tanah serta alat transportasi dan area atau daerah tempat tinggal seseorang.

2.4 Pemimpin Wanita

Pemimpin wanita di sini adalah para pemuka wanita pada tingkat desa/kelurahan yang menjadi pengurus Seksi PKK dari isteri pejabat pemerintahan dan tokoh wanita dalam masyarakat di desa/kelurahan tersebut.

2.5 Program PKK adalah suatu program pembangunan yang bertujuan mewujudkan keluarga sejahtera. Wanita dalam program PKK memegang peran utama sebagai pemimpin atau peserta. Di dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PKK tidak hanya merupakan program tetapi juga merupakan "gerakan" pembinaan kesejahteraan keluarga yang langsung berkaitan dengan peranan wanita dalam mencapai keluarga sejahtera.

2.6 Faktor adalah salah satu unsur yang memberikan iuran atau sumbangan terhadap suatu keadaan tertentu.

2.7 Determinatif adalah salah satu sifat yang menunjuk pada keadaan menentukan.

F. Anggapan Dasar dan Hipotesis

Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin. Faktor yang mempengaruhi itu dapat berasal dari dalam diri pemimpin maupun yang berasal dari luar dirinya. Faktor yang ada dalam diri pemimpin merupakan pengaruh yang kuat kepada penampilan perilaku seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif demi efektivitas kepemimpinannya.

Proses kepemimpinan dapat berjalan efektif apabila kepemimpinan itu didukung oleh pemimpin yang efektif pula. Kepemimpinan menunjuk pada suatu proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain yang ada dalam tanggung jawab kepemimpinannya. Semua ini dapat dilakukan atau diperankan oleh seorang pemimpin apabila dalam diri pemimpin itu ada modal kecenderungan bertindak untuk menjalankan fungsi pemimpin.

Di dalam rangka menganalisis peranan seorang pemimpin di dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinannya dapat pula ditinjau dari fungsi (tugas) pemimpin dalam suatu organi-

sasi dalam pengertian fungsi yang utama.

Fungsi utama yang harus dilaksanakan seorang pemimpin yaitu sebagai pelaksana, perencana, pembuat keputusan, ahli, dapat mewakili kelompoknya, pengawas dalam hubungan intern, pemberi ganjaran dan hukuman, seorang yang dapat berlaku adil dan seorang pendamai. Seorang pemimpin yang berfungsi dengan baik berarti ia dapat memerankan fungsi tersebut.

Suatu anggapan dasar lain yang dapat diterapkan pada penelitian ini ialah bahwa seorang pemimpin dalam usaha menjalankan kepemimpinannya secara efektif seyogianya didukung oleh seorang pribadi yang produktif dengan ciri - ciri sebagai berikut: Ada kemampuan menghargai dirinya sendiri, secara jelas dapat mengenal dirinya sendiri, mempunyai tanggung jawab sosial, berani menghadapi masalah kehidupan, orang yang mempunyai kebebasan pribadi dan mempunyai kekuatan dan keberanian di dalam mencapai suatu bentuk keputusan tertentu. Di samping itu ia dapat pula membaca dalam arti memahami orientasi tujuan yang akan dicapai oleh organisasi yang dipimpinnya, sifat-sifat pengikut, keadaan fisik maupun kenyataan sosial dalam pengertian lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya dalam menunjang produktivitas organisasi, lembaga atau usaha yang ia pimpin.

Pemimpin yang efektif tidak terlepas dari lingkup lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Dalam kon-

sep kepemimpinan ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pemimpin
2. Situasi/tujuan
3. Yang dipimpin.

Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain, merupakan unsur yang saling mempengaruhi, tetapi tidak dapat diingkari pula bahwa pemimpin mempunyai iuran yang besar untuk menentukan usaha mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi yang dipimpin maupun situasi yang dihadapinya. Dari anggapan dasar tersebut di atas maka dapat disimak bahwa faktor internal dan eksternal seorang pemimpin berupa sikap dan keadaan atau status sosial ekonominya dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya.

Anggapan dasar ini dapat melandasi suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

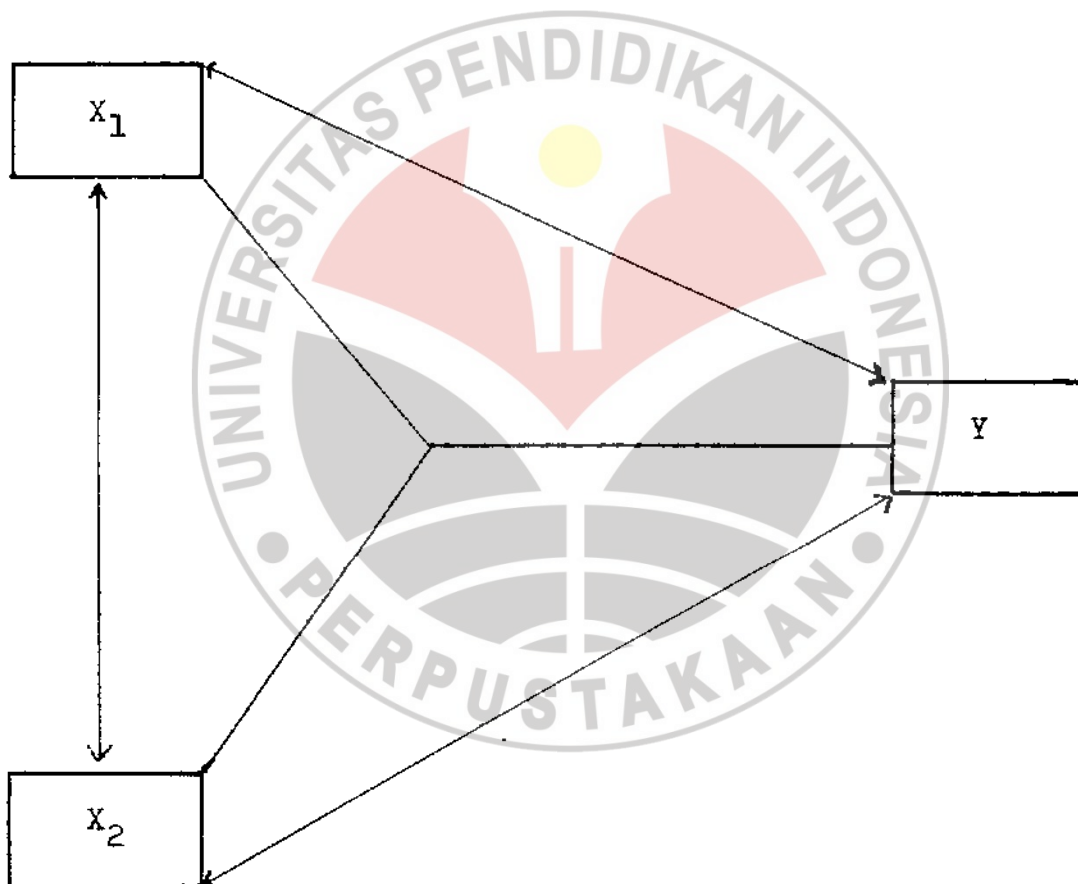
Sikap merupakan suatu dimensi kepribadian seseorang. Dimensi kepribadian ini mempunyai sifat mendorong kecenderungan bertindak seseorang di dalam lingkup kehidupannya dengan segala tugas dan peranannya. Sikap (positif) terhadap lingkup kerja seseorang akan sangat membantu berkembangnya daya cipta, rasa dan karsa seseorang di dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan seseorang yaitu keadaan sosial ekonomi.

Masalah model hubungan sikap dan tingkat status sosial ekonomi dalam mempengaruhi efektivitas kepemimpinan merupakan model hubungan yang kompleks.

Namun demikian model hubungan itu dapat disederhanakan seperti terlihat pada Bagan II di bawah ini.

Bagan II

Model Hubungan Beberapa Variabel Secara Hipotetik



Keterangan :

Y = Efektivitas kepemimpinan
X₁ = Status Sosial Ekonomi
X₂ = Sikap

Dari model hubungan variabel di atas, maka terdapat variabel bebas (independen) dan variabel tidak bebas (dependen). Variabel yang tidak bebas adalah efektivitas kepemimpinan (Y), sedangkan variabel yang bebas adalah status sosial ekonomi (X_1) dan sikap (X_2).

Berdasarkan kerangka berpikir ini maka dapatlah disusun beberapa hipotesis sebagai berikut:

- H₁ Bahwa terdapat hubungan fungsional antara efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita dalam Program PKK dengan sikap mereka terhadap PKK sebagai program pembangunan.
- H₂ Kadar keterpaduan hubungan antara variabel efektivitas kepemimpinan dengan variabel sikap merupakan hubungan yang bermakna.
- H₃ Bahwa terdapat hubungan fungsional antara efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita dalam Program PKK dengan tingkat status sosial ekonomi mereka.
- H₄ Kadar keterpaduan hubungan antara variabel efektivitas kepemimpinan dengan variabel status sosial ekonomi merupakan hubungan yang bermakna.
- H₅ Bahwa terdapat hubungan fungsional antara sikap pemimpin wanita terhadap Program PKK sebagai program pembangunan dengan variabel status sosial ekonomi.

- H₆ Bahwa antara masing-masing variabel (1) efektivitas kepemimpinan pemimpin wanita dalam Program PKK, (2) sikap pemimpin wanita terhadap Program PKK sebagai program pembangunan dan (3) status sosial ekonomi pemimpin wanita mempunyai keterpaduan hubungan majemuk yang bermakna.
- H₇ Hubungan variabel efektivitas kepemimpinan dengan sikap, maupun hubungan efektivitas kepemimpinan dengan status sosial ekonomi merupakan hubungan yang bersifat linier.

